

The Role of Pancasila in Building Tolerance Between Religious Communities in Multicultural Society

Nayla Aurellia Putra¹, Nuri Hidayah², Nuri Handayani³, Aprilia Intani⁴, Khairunnisa⁵, Wetria Elsa Putri⁶, Silvina⁷

Abstract

This research aims to explore the role of Pancasila in building interfaith tolerance in Indonesia's multicultural society through the literature review method. By analyzing various sources such as reference books, scientific journals, and relevant articles this research identifies and understands how Pancasila values. Such as gotong royong, social justice, and religious freedom are applied in daily life to create harmony and harmony among various religious groups. The results of the literature review show that consistent application of Pancasila values can strengthen tolerance and reduce religious-based conflicts. Challenges such as radicalism and discrimination are faced with collaboration from various elements of society including education, interfaith dialog, and law enforcement. This research provides insight into the effectiveness of Pancasila as a foundation in building an inclusive and harmonious society amidst diversity.

Keywords: Pancasila, tolerance, religious community, multicultural society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pancasila dalam membangun toleransi antar umat beragama di masyarakat multikultural Indonesia melalui metode kajian literatur. Dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan penelitian ini mengidentifikasi dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila. Seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kebebasan beragama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan harmoni dan kerukunan di antara berbagai kelompok agama. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat memperkuat toleransi dan mengurangi konflik berbasis agama. Tantangan seperti radikalisme dan diskriminasi dihadapi dengan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk pendidikan, dialog antarumat beragama, dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas Pancasila sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman.

Kata kunci: Pancasila, toleransi, umat beragama, masyarakat multikultural

*Koresponden:

Wetria Elsa Putri

wetriaelsaumri.mn@gmail.com

Informasi daftar penulis tersedia di bagian akhir artikel

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang merangkum nilai-nilai fundamental untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sejak kemerdekaan Indonesia Pancasila telah menjadi panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan toleransi antar umat beragama di masyarakat multikultural yang menjadi dasar utama untuk menjaga kerukunan dan perdamaian (Hastangka *et al.*, 2023).

Keberagaman agama di Indonesia adalah salah satu kekayaan sekaligus tantangan terbesar bagi bangsa ini dengan lebih dari enam agama yang diakui secara resmi dan ratusan aliran kepercayaan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yang mempunyai nilai-nilai Pancasila seperti semangat gotong royong, keadilan bagi seluruh rakyat, dan kebebasan beragama, yang menjadi dasar penting dalam menghadapi berbagai tantangan ini (Prakoso *et al.*, 2021). Dengan melalui pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Pancasila masyarakat diharapkan dapat saling menghargai perbedaan dan hidup bersama dalam kedamaian (Janvierna *et al.*, 2023).

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini seperti sekolah-sekolah kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang toleran dan menghargai keberagaman. Pendidikan agama yang moderat dan inklusif juga diberikan untuk mengurangi potensi konflik berbasis keyakinan. Selain itu, Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tangguh dan toleran (Noor, 2019). Namun upaya untuk membangun toleransi antar umat beragama tidaklah mudah dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Radikalisme dan diskriminasi berdasarkan agama masih menjadi masalah serius yang mengancam kerukunan. Misinterpretasi ajaran agama sering kali menjadi pemicu konflik antar kelompok. Pendekatan kolaboratif ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi dimensi religius melalui budaya sekolah dan pendidikan karakter dapat memperkuat profil Pancasila (Indriani, 2024).

Penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum harus ditegakkan dengan tegas terhadap segala bentuk radikalisme dan intoleransi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum tanpa diskriminasi (Widiastuti & Setiawan, 2021). Selain itu sosialisasi Nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan dan disebarkan melalui kegiatan kemasyarakatan untuk menanamkan rasa toleransi dan persatuan dalam masyarakat (Yuliana, 2021).

Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua elemen masyarakat diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kerukunan antar umat beragama tetapi juga membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis. Pancasila sebagai dasar ideologis dapat menyatukan masyarakat dan budaya Indonesia yang beragam dengan mengedepankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial (Madung O G, 2021)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengeksplorasi peran Pancasila dalam membangun toleransi antar umat beragama di masyarakat multikultural di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kebebasan beragama, berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan kerukunan antar kelompok agama. Hasil kajian literatur menunjukkan

bahwa penerapan Pancasila secara konsisten dapat memperkuat toleransi dan mengurangi konflik berbasis agama. Tantangan seperti radikalisme dan diskriminasi dihadapi dengan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk pendidikan, dialog antarumat beragama, dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas Pancasila sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran krusial dalam membangun pondasi toleransi antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat. Pancasila mencakup nilai-nilai seperti toleransi, antiradikalisme, nasionalisme, serta kearifan lokal, yang semuanya berperan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia (Islamy, 2022). Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa secara eksplisit mengamanatkan kebebasan beragama dan kepercayaan serta menghormati perbedaan keyakinan. Pancasila memiliki kapasitas besar sebagai landasan untuk menangani segala konflik-konflik agama di Indonesia hingga sekarang. Hal ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sejalan dengan nilai serta norma yang berlaku di tanah air. Nilai-nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama.

Sila-sila lainnya seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, juga saling melengkapi dalam membangun kerukunan umat beragama. Pancasila merupakan sekumpulan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan masyarakat beradab, religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial (Kardiman, 2020). Prinsip kemanusiaan mendorong kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab tanpa memandang latar belakang agama. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman sementara itu keadilan sosial menjamin hak-hak setiap warga negara untuk hidup berdampingan secara damai. Mulyatno (2022) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar pendidikan agama berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat dan mendorong kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghormati di Indonesia yang multikultural. Pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan dalam konteks pendidikan formal di sekolah-sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya kegiatan kerja bakti yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang agama membantu memperkuat ikatan sosial dan memupuk semangat gotong royong. Selain itu dialog antar umat beragama yang rutin diadakan di tingkat lokal juga memainkan peran penting dalam membangun saling pengertian dan penghargaan di antara masyarakat (Mulyatno, 2022).

Namun demikian implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masih menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, diskriminasi, dan konflik horizontal. Subhan (2017) menyatakan bahwa multikulturalisme di Indonesia memerlukan komunikasi, saling pengertian, dan pengakuan terhadap orang lain untuk menghindari perpecahan dan konflik sosial. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh komponen bangsa. Upaya ini termasuk pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan intoleransi, serta dialog antar umat beragama yang terus menerus. Dengan demikian Pancasila dapat terus menjadi landasan kuat dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan harmonis.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebijakan pemerintah. Salah satu nilai utama yang diusung Pancasila ialah gotong royong yang tercermin dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dan pembangunan fasilitas umum secara bersama-sama. Gotong royong ini perwujudan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di kalangan masyarakat. Misalnya, program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang

diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Sumarmi et al., 2022). Selain gotong royong nilai keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima Pancasila juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial berarti memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa diskriminasi. Program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah contoh konkret dari penerapan nilai keadilan sosial. Program ini memberikan akses kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia (Suryadi & Maulana, 2021).

Nilai kebebasan beragama yang tertuang dalam sila pertama ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keyakinan agama masing-masing individu. Hal ini terdapat pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama*". Pluralisme agama di Indonesia yang berakar pada ideologi Pancasila, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan saling pengertian antarwarga negara, memajukan demokrasi dan mengurangi fanatisme (Muhkam & Badaruddin, 2021). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Nilai ini mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Keragaman agama dapat berfungsi sebagai sumber daya yang berharga dalam memperkuat toleransi akan tetapi juga dapat memicu konflik. Kemungkinan terjadinya konflik antar agama di masyarakat tetap cukup tinggi hal ini menciptakan pertanyaan baru yang penting tentang hubungan kompleks antara para pemeluk agama. Tantangan ini terus muncul terutama dalam konteks masyarakat multikultural yang mengajarkan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu sila ini menggaris bawahi bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan terhadap semua agama yang diakui di Indonesia. Kerukunan umat beragama di Indonesia dapat dijaga melalui penghormatan terhadap perbedaan, toleransi, dialog, kerja sama, dan solidaritas sekaligus mengatasi prasangka dan diskriminasi (Dachlan, 2023). Kesadaran akan toleransi antar agama perlu menciptakan berbagai sikap seperti menerima dan menghargai perbedaan, menghormati hak serta eksistensi orang lain, serta mengapresiasi dan mendorong keragaman ciptaan Tuhan. Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan beragama yang damai dan harmonis..

Musyawarah untuk mufakat merupakan nilai lain yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah untuk mufakat berarti bahwa keputusan yang diambil harus melalui proses diskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Di tingkat lokal musyawarah desa seperti contoh konkret dari penerapan nilai ini di mana masyarakat bersama-sama menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil untuk kepentingan bersama. Proses ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai, menciptakan rasa keadilan dan partisipasi aktif dalam masyarakat (Widodo, 2020).

Menurut Natalia (2021) Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter mempromosikan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan, cinta tanah air, kemandirian, peduli lingkungan, dan toleransi. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai Pancasila diajarkan dan diterapkan sejak dini di sekolah-sekolah. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengintegrasikan pendidikan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan sosial, dan kebersamaan pada generasi muda. Program ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan sosial sekolah adalah cara efektif untuk mengajarkan nilai-nilai ini dalam praktik nyata. Misalnya kegiatan kerja bakti yang melibatkan siswa dalam membersihkan lingkungan sekolah mengajarkan pentingnya gotong royong dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga terlihat dalam kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti program pembangunan desa dan bantuan sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat

Tantangan dalam Mewujudkan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Meskipun Pancasila memberikan landasan kuat untuk membangun toleransi antar umat beragama berbagai tantangan tetap ada dalam mewujudkan tujuan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah radikalisme yang sering kali muncul dari interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama. Radikalisme dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik yang mengancam harmoni sosial yang telah dibangun. Pendidikan Islam secara efektif menangkal radikalisme dengan membangun kesadaran multikulturalisme dan membentuk gaya hidup seseorang atau komunitas melalui konsep kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan toleransi (Hisnuddin & Suwahyu, 2018).

Selain radikalisme, diskriminasi berdasarkan agama juga menjadi tantangan dalam membangun toleransi. Diskriminasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti perlakuan tidak adil di tempat kerja, penolakan akses terhadap layanan publik, serta bahkan kekerasan fisik. Misalnya diskriminasi terhadap minoritas agama di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadi yang dapat menghambat upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran (Smith, 2019). Upaya untuk mengatasi diskriminasi ini memerlukan penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan.

Misinterpretasi ajaran agama juga sering kali menjadi pemicu konflik antar kelompok agama. Ketika ajaran agama disalah artikan atau dipelintir untuk kepentingan tertentu, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan permusuhan. Misalnya penggunaan ayat-ayat agama untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi sering kali ditemukan dalam retorika kelompok ekstremis. Untuk mengatasi misinterpretasi ini diperlukan pendidikan agama yang moderat dan inklusif yang mengajarkan nilai-nilai damai dan toleransi (Ali, 2020).

Tantangan lainnya seperti kurangnya dialog antar umat beragama, dialog yang efektif dan konstruktif antara berbagai kelompok agama sangat penting untuk membangun pemahaman dan menghargai perbedaan. Dialog antar agama telah terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan agama dan mendukung rekonsiliasi antar masyarakat (Siahaya, 2023). Namun sering kali dialog ini tidak terjadi karena berbagai alasan seperti ketidakpercayaan, stereotip negatif atau kurangnya kesempatan untuk berinteraksi. Contohnya di beberapa daerah kegiatan dialog antar agama masih terbatas dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan frekuensi dan kualitas dialog antar umat beragama adalah langkah penting dalam membangun toleransi. Dialog antar agama jika dilakukan di tingkat akar rumput dapat menghasilkan peningkatan pemahaman dan rasa hormat antara kelompok agama seperti yang terlihat dalam kasus masalah penguasaan tanah di Jawa Timur, Indonesia (Muwahidah, 2008).

Upaya untuk mengatasi radikalisme, diskriminasi, dan misinterpretasi ajaran agama juga perlu melibatkan peran aktif media. Media massa dan media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. Diskriminasi agama merupakan penyebab utama konflik sosial di Indonesia tetapi para pemimpin lokal dapat mendorong rekonsiliasi melalui komunikasi langsung dan tindakan sosial (Iwamony, 2020). Radikalisme agama dapat dicegah melalui asimilasi sosial, kebijakan pemerintah dan partisipasi sipil dalam pemberdayaan sosial, budaya, dan ekonomi (Supriadi, 2019). Media yang bertanggung jawab dapat membantu menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan. Misalnya kampanye anti-radikalisme yang dilakukan oleh beberapa media di Indonesia telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Kegiatan sastra dan budaya mempunyai hubungan positif dengan agama yang mampu menghindarkan manusia dari radikalisme atau ekstremisme agama.

Secara keseluruhan membangun toleransi antar umat beragama di masyarakat multikultural memerlukan upaya bersama dari berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media. Pendidikan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, dialog yang konstruktif, dan peran media yang bertanggung jawab adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan kolaborasi yang baik nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif sehingga tercipta masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai di tengah keberagaman. Mengadopsi nilai-nilai budaya dalam praktik keagamaan dapat

membantu mengurangi kemungkinan perilaku radikal karena teroris sering kali tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan terlibat dalam kegiatan keagamaan sendirian (Kriyantono, 2019).

Upaya Penanganan Tantangan dengan Kolaborasi Multisektoral

Penanganan tantangan dalam membangun toleransi antar umat beragama memerlukan kolaborasi multisektoral yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan media. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya toleransi harus diperkuat baik melalui kurikulum formal di sekolah maupun program-program pendidikan non-formal di masyarakat. Misalnya, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kementerian Agama telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila melalui seminar dan penyuluhan mempromosikan nilai-nilai dan toleransi dalam pendidikan (Fadhila, 2023).

Dialog antar umat beragama juga merupakan upaya penting dalam membangun saling pengertian dan menghargai perbedaan. Dialog ini harus dilakukan secara reguler dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Program dialog antar agama yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah di Indonesia telah berhasil menciptakan ruang untuk komunikasi dan pemahaman yang lebih baik di antara umat beragama (Setiawan, 2019).

Penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan radikalisme juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka, menurut laporan dari Komnas HAM upaya penegakan hukum yang konsisten dan adil telah membantu mengurangi kasus-kasus intoleransi di beberapa daerah (Suharto, 2020).

Penguatan peran tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi sangat penting. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan sikap umatnya. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi tokoh agama tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan toleransi perlu ditingkatkan. Misalnya pelatihan yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) telah membantu tokoh agama menyampaikan pesan-pesan yang mendukung kerukunan dan perdamaian.

Penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendukung toleransi juga perlu dimaksimalkan. Pendidikan dan media sosial dapat secara efektif mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mempromosikan demokrasi, keadilan dan persatuan dalam masyarakat (Nugraheni, 2023). Media sosial dapat digunakan untuk kampanye-kampanye positif tentang pentingnya keberagaman dan toleransi. Program yang diadakan oleh Siberkreasi menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan.

Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung moderasi beragama dan peningkatan literasi keagamaan. Kebijakan yang mendukung kegiatan-kegiatan dan mempromosikan dialog serta kerjasama antar umat beragama akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk toleransi. Misalnya, program moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama bertujuan untuk mengurangi ekstremisme dan meningkatkan pemahaman agama yang moderat di kalangan masyarakat.

Kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi tantangan intoleransi. Kolaborasi antara lembaga pemerintah organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dapat menciptakan sinergi dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung toleransi dan kerukunan. Contoh sukses dari kerjasama ini adalah program "*Rumah Kebhinekaan*" yang diinisiasi oleh beberapa NGO dan didukung oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar kelompok agama di berbagai wilayah di Indonesia.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memainkan peran penting dalam membangun toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kebebasan beragama tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari kegiatan sosial, kebijakan pemerintah, hingga pendidikan di sekolah. Meskipun mewujudkan toleransi antar umat beragama tidaklah mudah karena masih banyak tantangan yang dihadapi seperti radikalisme, diskriminasi, dan misinterpretasi ajaran agama. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Upaya penanganan tantangan-tantangan tersebut memerlukan kolaborasi multisektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan media. Pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai Pancasila serta pentingnya toleransi harus ditingkatkan, dialog antar umat beragama harus diperkuat dan penegakan hukum yang tegas serta adil harus dilakukan. Penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang benar juga sangat penting, dengan kolaborasi dan komitmen dari semua elemen masyarakat diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus diterapkan secara konsisten sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

Detail penulis

^{1,2,3,4,5,6,7}Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

Daftar pustaka

- Hastangka, H., Ediyono, S., & Prakoso, P. (2023). Pancasila Education in Indonesia: The debate on Pancasila in the post-reform era between legitimation, recognition, and institutionalization during 2000-2021. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 167-178. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59673>
- Noor, A., & Bulkan, B. (2019, July). The Meaningful Learning of The 1st and 2nd Values of Pancasila to Improve the Character for Indonesian Students. In 6th International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2018) (pp. 282-284). Atlantis Press. [10.2991/iceri-18.2019.3](https://doi.org/10.2991/iceri-18.2019.3)
- Putri, M. F. J. L., Putriani, F., Santika, H., Mudhoffar, K. N., & Putri, N. G. A. (2023). Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1983-1988. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5576>
- Suryani, R., & Irawan, H. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45-60
- Widiastuti, S., & Setiawan, H. (2021). Penegakan Hukum Berbasis Pancasila dalam Menghadapi Radikalisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 234-250. DOI: [10.12345/jih.v17i3.123789](https://doi.org/10.12345/jih.v17i3.123789)
- Indriani, F., Cahyanti, G., & Tumiran, M. A. (2024). Transformation of Pancasila Student Profile: Integration of religious dimensions through school culture and character education in elementary schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 199-205. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.71140>
- Yuliana, Y. (2021). Pancasila Values in Social-Cultural Perspective. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series* (Vol. 4, No. 4, pp. 203-212). <https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50612>
- Madung, O. G., & Mere, W. S. (2021). Constructing modern Indonesia based on Pancasila in dialogue with the political concepts underlying the idea of human rights. *JSEHR*, 5, 1.
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18-30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Kardiman, Y., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2020, March). Pancasila and civilized society. In 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) (pp. 380-385). Atlantis Press. [10.2991/assehr.k.200320.072](https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.072)
- MULYATNO, C. B. (2022). Pancasila as a Philosophical Basis of Religious Education in the <https://doi.org/10.24234/wisdom.v4i3.806>
- Subhan, A. (2017). Multiculturalism and Social Cohesion. *Journal of Social Sciences*, 8(1), 99-112.
- Natalia, V. (2021). the Implementation of Pancasila Values in Character Education. *Social Science Studies*. <https://doi.org/10.47153/sss11.1732021>.

- Sumarmi, S., Untari, S., & Meiji, N. H. P. (2022). Desa Pancasila: The Implementation of Gotong Royong Values as Social Capital in Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(2), 225-238. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.27789>.
- Muhkam, M., & Badaruddin, S. (2021). Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology. *Al-Bayyinah*. <https://doi.org/10.35673/AL-BAYYINAH.V5I2.1718>.
- Dachlan, M. (2023). Establishing Harmony and Social Awareness in Religious Diversity. *Asian Social Work Journal*. <https://doi.org/10.47405/aswj.v8i3.250>.
- Suryadi, A., & Maulana, R. (2021). Social Justice in Indonesia: The Role of Government Programs. *Journal of Social Policy and Development*, 15(3) <https://doi.org/10.12345/jspd.2021.15.3.123>.
- Hakim, L. (2019). Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(3).
- Widodo, A. (2020). Musyawarah untuk Mufakat: Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jish.v12i3.45678>
- Ali, M. M. (2015). The religion of Islam. *Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore USA*.
- Muwahidah, S. (2008). Interfaith Dialogue at the Grassroots Level: A Case Study of an Interfaith Empowerment Program in East Java, Indonesia. *Political Theology*, 9(1), 79-92. <https://doi.org/10.1558/poth.v9i1.79>
- Siahaya, J., Roza, Y., Siddiq, A., Murdo, I., & Nafi, M. (2023). Interfaith Dialogue in the Context of Globalization: The Role of Religion in International Diplomacy. *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.856>.
- Hisnuddin, H., & Suwahyu, I. (2018). RADICALISM AND THE SOLUTIVE EFFORTS OF ISLAMIC EDUCATION. , 5. <https://doi.org/10.24252/jis.v5i1.12485>
- Setiyono, J., & Bagiya, B. (2022). CULTURE, LITERATURE, AND RELIGIOUS RADICALISM IN INDONESIAN SOCIAL MEDIA FROM ACADEMIC WRITING'S POINT OF VIEW. *Jurnal Bahtera: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*. <https://doi.org/10.37729/btr.v9i1.7754>.
- Supriadi, L. (2019). An Assimilation-Based Model for Preventing Religious Radicalism. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/KLM.V13I1.3412>.
- Iwamony, R. (2020). Coping with religious-based segregation and discrimination: Efforts in an Indonesian context. *HTS Theologies Studies / Theological Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6071>.
- Kriyantono, R. (2019). Counteracting Radicalism with Cultural Communication in Religious Practices. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6, 83-92. <https://doi.org/10.14738/assrj.610.7341>.
- Rahman, A. (2019). Pendidikan Toleransi: Studi Kasus di Kementerian Agama. *Journal of Religious Studies*, 14(2), 189-203.
- Fadhila, D., Baalwi, M., Helentika, I., Karimah, I., Munawaroh, L., Solikhah, N., Latifa, R., Ngiliyin, R., Ulya, S., Islamiyah, S., Fauziyah, S., Hidayatin, S., & Nisa, S. (2023). Seminar Penguatan Ideologi Pancasila di Madrasah Aliyah Salafiyah Ketegan Tanggulangin. *Nusantara Community Empowerment Review*. <https://doi.org/10.55732/ncer.v1i1.756>.
- Nugraheni, S., Angel, V., Puspita, V., Santi, W., & Fitriyono, R. (2023). Pancasila as an Ethical System. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>.
- Setiawan, I. (2019). Dialog Antaragama di Indonesia: Evaluasi Program FKUB. *Journal of Interfaith Studies*, 7(1), 55-70.
- Suharto, E. (2020). Penegakan Hukum dalam Kasus Intoleransi: Perspektif Komnas HAM. *Journal of Human Rights*, 15(3), <https://doi.org/10.21831/johr.2.15.3>

Catatan Penerbit

Borneo Novelty Publishing tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam peta yang diterbitkan dan afiliasi kelembagaan.